

ROADMAP KEUANGAN BERKELANJUTAN TAHAP II (2021 - 2025)

Sustainable Finance Roadmap Phase II (2021 - 2025)

THE FUTURE OF FINANCE





**THE
FUTURE
OF FINANCE**

ROADMAP KEUANGAN BERKELANJUTAN TAHAP II (2021 - 2025)

*Sustainable Finance Roadmap Phase II
(2021 - 2025)*

Tim Penyusun Contributing Team

Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021 - 2025) disusun oleh Tim Sustainable Finance Departemen Internasional dan Tim Lintas Sektor Sustainable Finance OJK.

Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak terkait yang telah bekerja sama dengan baik dalam mendukung pengembangan inisiatif Keuangan Berkelanjutan, antara lain:

1. Kementerian dan Lembaga terkait: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kemenko Perekonomian, Kemenko Maritim dan Investasi (Kemenkomarves), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Bank Indonesia;
2. Lembaga Nasional maupun Internasional: International Finance Corporation (IFC) World Bank, United States Agency for International Development (USAID), dan WWF Indonesia.

The Sustainable Finance Roadmap Phase II (2021 - 2025) was prepared by the Sustainable Finance Team of the International Affairs Department and the Sustainable Finance Cross-Sectoral Team of OJK.

We would like to convey our gratitude to all parties who have cooperated in supporting the development of the Sustainable Finance initiative, including:

1. Relevant Ministries and Government Agencies: National Development Planning Agency (Bappenas), the Ministry of Finance (Kemenkeu), the Ministry of Environment and Forestry (KLHK), the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM), the Coordinating Ministry of Economic Affairs, the Coordinating Ministry of Maritime and Investment Affairs (Kemenkomarves), the Ministry of Industry (Kemenperin), and Bank Indonesia;
2. National and International Organizations: International Finance Corporation (IFC) World Bank, United States Agency for International Development (USAID), and WWF Indonesia.

DAFTAR ISI

Table of Contents

Daftar Grafik dan Tabel <i>List of Graphs and Tables</i>	04
Daftar Singkatan <i>List of Abbreviations</i>	05
Sambutan Ketua Dewan Komisiner OJK <i>Foreword from the Chairman of OJK Board of Commissioners</i>	08
Ringkasan Eksekutif <i>Executive Summary</i>	11
1. The Future is Now	14
• Keuangan Berkelanjutan Indonesia Saat Ini <i>Sustainable Finance in Indonesia: The Current Journey</i>	14
• Kebutuhan Pengembangan ke Depan <i>The Next Journey</i>	17
2. Speeding up Sustainable Finance	20
• Mengubah Tantangan menjadi Peluang <i>Transforming Challenges into Opportunities</i>	20
• Membangun Ekosistem Keuangan Berkelanjutan <i>Building the Ecosystem</i>	23
3. Creating the Future	25
• Menangkap Peluang Pendanaan <i>Seizing Funding Opportunities</i>	27
• Prioritas Pengembangan Roadmap Tahap II <i>Priorities in the Phase II Roadmap</i>	31
Catatan <i>Notes</i>	33
Daftar Pustaka <i>References</i>	35

DAFTAR GRAFIK DAN TABEL

List of Graphs and Tables

Gambar 1. Prinsip Keuangan Berkelanjutan Indonesia.
Figure 1. Principles of Sustainable Finance in Indonesia.

Gambar 2. Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan.
Figure 2. Sustainable Business Activities Category.

Gambar 3. Capaian Keuangan Berkelanjutan di Indonesia.
Figure 3. Achievements of Sustainable Finance in Indonesia.

Gambar 4. Fora Internasional mengenai Inisiatif Keuangan Berkelanjutan.
Figure 4. International Forums regarding Sustainable Finance Initiative.

Gambar 5. Ekosistem Keuangan Berkelanjutan Indonesia.
Figure 5. Ecosystem of Sustainable Finance in Indonesia.

Gambar 6. Detail Pengembangan Inisiatif Keuangan Berkelanjutan (2021 - 2025).
Figure 6. Details of the Development of the Sustainable Finance Initiative (2021 - 2025).

Gambar 7. Keseimbangan Sisi Supply dan Demand Keuangan Berkelanjutan.
Figure 7. Balance of the Supply and Demand of Sustainable Finance.

Gambar 8. Risiko Terkait Perubahan Iklim.
Figure 8. Climate-related Risks.

DAFTAR SINGKATAN

List of Abbreviations

3P	: Profit, People, dan Planet
BAPPENAS	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional <i>National Development Planning Agency</i>
BCSF	: Bali Center for Sustainable Finance
CFSG	: Climate Friendly Study Group
ESDM	: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral <i>Ministry of Energy and Mineral Resources</i>
FSB	: Financial Stability Board
GRI	: Global Reporting Initiative
IDH	: Inisiatif Dagang Hijau <i>The Sustainable Trade Initiative</i>
IFC	: International Finance Corporation
IJK	: Industri Jasa Keuangan <i>Financial Institutions</i>
IKBI	: Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia <i>Indonesia Sustainable Finance Initiative</i>
IKNB	: Industri Keuangan Non-Bank <i>Non-Bank Financial Industry</i>
IMF	: International Monetary Fund
K/L	: Kementerian/Lembaga <i>Ministry/Institution</i>
KDK	: Keputusan Dewan Komisioner <i>OJK Board of Commissioners Decision</i>
Kemenkeu	: Kementerian Keuangan <i>Ministry of Finance</i>
Kemenkomarves	: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi <i>Coordinating Ministry for Maritime and Investment Affairs</i>
Kemenperin	: Kementerian Perindustrian <i>Ministry of Industry</i>
KKUB	: Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan <i>Sustainable Business Activities Category</i>
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <i>Ministry of Environment and Forestry</i>
KUBL	: Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan <i>Environmentally Friendly Business Activities</i>

LST	: Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola <i>Environmental, Social, and Governance</i>
MDBs	: Multilateral Development Banks
MPSJKI	: Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia <i>Indonesia Financial Services Sector Master Plan</i>
NGFS	: The Network for Greening the Financial System
OECD	: Organisation for Economic Co-operation and Development
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan <i>Indonesia Financial Services Authority</i>
PDB	: Produk Domestik Bruto <i>Gross Domestic Product</i>
POJK	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan <i>OJK Regulation</i>
RAKB	: Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan <i>Sustainable Finance Action Plan</i>
SBN	: Sustainable Banking Network
SFA	: Sustainable Finance Award
SFIH	: Sustainable Finance Information Hub
TCFD	: Task Force on Climate-Related Financial Disclosures
TKB	: Training Keuangan Berkelanjutan <i>Sustainable Finance Training</i>
TOT	: Training of Trainers
TPB	: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan <i>Sustainable Development Goals</i>
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah <i>Micro, Small, and Medium Enterprises</i>
UNDP	: United Nations Development Programme
UNEP - FI	: United Nations Environment Programme Finance Initiative
USAID	: United States Agency for International Development
WEF	: World Economic Forum
WWF	: World Wildlife Fund



SAMBUTAN KETUA DEWAN KOMISIONER OJK

Foreword from the Chairman of OJK Board of Commissioners



Wimboh Santoso
Ketua Dewan Komisiner

“ Mengubah pola pikir bisnis konvensional menjadi bisnis berkelanjutan harus didasari oleh kepemimpinan dan semangat untuk segera bersiap menghadapi perubahan arah pengembangan sektor jasa keuangan ke depan, yaitu perkembangan teknologi dan bisnis berkelanjutan ”

Saat ini dampak perubahan iklim telah dirasakan oleh masyarakat global. Siklus alam yang tidak seimbang telah memacu meningkatnya permasalahan lingkungan hidup dan sosial. Di saat masyarakat global tengah menghadapi pandemi Covid-19, perubahan iklim disinyalir dapat meningkatkan variabilitas pola cuaca sehingga dapat mempercepat penularan penyakit. Pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh belahan dunia, telah memicu krisis *extraordinary* dan sekaligus menjadi momentum bagi semua pihak untuk melakukan evaluasi pentingnya penerapan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam seluruh aktivitas pembangunan.

Terdapat beberapa tantangan dalam upaya mengubah pola pikir berkelanjutan yang perlu diatasi. Kerja sama yang melibatkan berbagai pihak untuk memitigasi dan beradaptasi terhadap perubahan iklim menjadi solusi utama dalam memastikan investasi pendukung telah

The impact of climate change has been experienced by the global community. Unbalanced natural cycle has led to an increase in environmental and social problems. While the global community is struggling with the Covid-19 pandemic, climate change is allegedly capable to increase the variability of weather patterns that could speed up the transmission of diseases. The Covid-19 pandemic that is taking place in all parts of the world has triggered an extraordinary crisis and at the same time has become a momentum for all parties to evaluate the importance of implementing environmental, social, and governance aspects in all development activities.

There are several challenges to be addressed when it comes to transforming a sustainable mindset. Collective cooperation to mitigate and adapt to climate change is believed to be the main solution in ensuring supporting investments are in line with sustainable

memenuhi kategori berkelanjutan dengan mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Dalam konteks ini, sektor Jasa Keuangan memiliki peran penting dalam mempercepat proses pemulihan ekonomi melalui perubahan pola bisnis konvensional menjadi berkelanjutan. Proses perubahan tersebut dapat dipadukan secara bersama-sama dengan perkembangan teknologi.

Proses transisi dengan menerapkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam keuangan berkelanjutan membutuhkan waktu serta tahapan yang lebih terarah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. OJK telah meletakkan dasar keuangan berkelanjutan melalui *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap I (2015 - 2019)* yang berfokus pada peningkatan pemahaman, pengembangan kapasitas serta peletakan dasar regulasi bagi Industri Jasa Keuangan.

Selanjutnya, OJK telah menyelesaikan *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II* untuk mempercepat penerapan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola di Indonesia. *Roadmap Tahap II* berfokus pada penciptaan ekosistem keuangan berkelanjutan secara komprehensif, dengan melibatkan seluruh pihak terkait dan mendorong pengembangan kerja sama dengan pihak lain.

Kami mengucapkan terima kasih atas kontribusi seluruh pihak yang telah memberikan masukan dalam pengembangan inisiatif Keuangan Berkelanjutan di Indonesia. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada pihak terkait seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kemenko Perekonomian, Kemenko Maritim dan Investasi (Kemenkomarves), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Bank Indonesia. Terima kasih kami sampaikan pula kepada lembaga nasional maupun internasional seperti International Finance Corporation (IFC) World Bank, United States Agency for International Development (USAID), dan WWF Indonesia.

principles by integrating environmental, social, and governance aspects. In this context, Financial Services Sector could play a role in accelerating economic recovery process by transforming conventional business process into sustainable ones. The process could be done simultaneously with current technological advances.

The transition process towards sustainable finance through the implementation of environmental, social, and governance aspects requires more time and directed steps in order to achieve sustainable economic growth. OJK has built the foundation of sustainable finance through the Sustainable Finance Roadmap Phase I (2015 - 2019), which focused on enhancing awareness, capacity building as well as laying out the regulatory foundation for financial institutions.

Further, OJK has created the Sustainable Finance Roadmap Phase II to accelerate the implementation of environmental, social, and governance aspects in Indonesia. The Phase II Roadmap focuses on creating a comprehensive sustainable finance ecosystem that involves all related parties and promoting cooperation at various levels.

We would like to thank all contributing parties who have provided input on the development of the Sustainable Finance initiative in Indonesia. We would like to specifically express our gratitude to all relevant parties such as National Development Planning Agency (Bappenas), the Ministry of Finance (Kemenkeu), the Ministry of Environment and Forestry (KLHK), the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM), the Coordinating Ministry of Economic Affairs, the Coordinating Ministry of Maritime and Investment Affairs (Kemenkomarves), the Ministry of Industry (Kemenperin), and Bank Indonesia. We would also like to thank domestic and international organizations such as International Finance Corporation (IFC) World Bank, United States Agency for International Development (USAID), and WWF Indonesia.



Kami meyakini bahwa usaha keras dan berkesinambungan akan menghasilkan capaian penting dalam implementasi keuangan berkelanjutan di Indonesia. *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021 - 2025)* diharapkan dapat menjadi landasan bagi Sektor Jasa Keuangan dan rujukan untuk Kementerian/Lembaga (K/L) terkait dalam mengembangkan inisiatif-inisiatif pembiayaan inovatif. Kita berharap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Perubahan Iklim menjadi agenda penting bagi para pemimpin. Dengan demikian, penerapan Keuangan Berkelanjutan akan menjadi “*new normal*” bagi Sektor Jasa Keuangan.

Wimboh Santoso

Ketua Dewan Komisiner
Chairman of OJK Board of Commissioners

We believe our continuous hard work will result in substantial accomplishments in the implementation of sustainable finance in Indonesia. We also hope that the Sustainable Finance Roadmap Phase II (2021 - 2025) could become a foundation for the Indonesia's Financial Services Sector and serve as a reference for related Ministries/Institutions in developing innovative financing initiatives. It is also our hope that climate change and SDGs be at the top of every leader's agenda. As a result, implementing Sustainable Finance will be the “new normal” for the Indonesia's Financial Services Sector.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Executive Summary

Pertumbuhan ekonomi yang bertanggung jawab menjadi bagian tidak terpisahkan dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Transisi menuju pembangunan berkelanjutan tersebut harus didasari oleh perubahan pola pikir pelaku usaha bahwa kegiatan usaha akan lebih baik dan langgeng apabila memperhatikan aspek sosial, lingkungan, dan tata kelola. Oleh karena itu, OJK telah menyusun *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap I (2015 - 2019)* yang bertujuan meningkatkan pemahaman serta kapasitas pelaku sektor jasa keuangan untuk beralih menuju ekonomi rendah karbon. *Roadmap Tahap I* telah menghasilkan beberapa capaian seperti pengenalan prinsip keuangan berkelanjutan, pengelompokan kriteria usaha berkelanjutan, pengembangan insentif serta pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan bagi industri keuangan.

Industri keuangan memberikan respons positif terhadap inisiatif keuangan berkelanjutan. Respons positif dari dunia internasional juga diberikan kepada Indonesia atas penerapan inisiatif tersebut. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa *gap* yang dihadapi, seperti rendahnya tingkat pemahaman industri terhadap keuangan berkelanjutan, belum adanya kesepakatan standarisasi kategori hijau di tingkat nasional serta pemanfaatan peluang bisnis di sektor berkelanjutan. Beberapa *gap* tersebut harus segera diselesaikan sehingga industri keuangan dapat memaksimalkan peluang yang ada seiring dengan meningkatnya tuntutan pasar dan masyarakat akan produk dan jasa keuangan yang berkelanjutan. Pemanfaatan peluang tersebut harus diiringi dengan pengelolaan risiko terkait perubahan iklim untuk mencegah dampak negatif yang tidak diinginkan. Risiko perubahan iklim meliputi risiko fenomena perubahan iklim yang menimbulkan kerusakan properti dan berdampak langsung terhadap proses bisnis (*physical risk*), risiko yang muncul dari perubahan kebijakan dan pengembangan teknologi untuk beralih ke ekonomi rendah

Responsible economic growth is an integral part of sustainable development goals. Transitioning to sustainable development must stem from a change in the mindset of business actors that business activities are best conducted when social, environmental and governance aspects are taken into consideration. In this regard, OJK released the Sustainable Finance Roadmap Phase I (2015 - 2019) which aimed to increase the understanding and capacity of financial services sector actors to move towards a low-carbon economy. The Roadmap Phase I achieved several milestones such as introduction of sustainable finance principles, identification of numerous sustainable business criteria, developing an incentive scheme, and conducting series of training programs for the financial industry.

The financial industry has responded positively to this sustainable finance initiative. As well, international community also applaud Indonesia's move on rolling out this initiative. However, some gaps remain to be filled, such as the industry's low awareness of sustainable finance, the absence of commonly agreed green standards in a national scale and untapped business opportunities in the sustainable sector. Some of these gaps must be resolved immediately so that the financial industry can maximize the opportunities as the demand of the market and society for sustainable financial products and services increases. These opportunities must be followed by the management of climate-related risks to prevent unwanted negative impacts. Climate change risks include risk of climate change phenomena that cause property damage and directly affect business processes (physical risk), risk arising from changes in policy and technology development while shifting to a



karbon (*transition risk*), dan risiko kerugian hukum atau klaim akibat kegiatan usaha yang tidak mempertimbangkan dampak perubahan iklim (*liability risk*).

Untuk mempercepat transisi sektor keuangan ke arah berkelanjutan, pada *Roadmap* Tahap II ini, OJK mengembangkan sebuah ekosistem yang terdiri dari 7 komponen. Ketujuh komponen tersebut meliputi kebijakan, produk, infrastruktur pasar, koordinasi kementerian/ lembaga, dukungan non-pemerintah, sumber daya manusia, dan *awareness*. Pembentukan komponen dalam ekosistem keuangan berkelanjutan juga merupakan komitmen OJK dalam menciptakan regulasi yang transparan, membangun sinergi dengan kementerian/ lembaga, dan meningkatkan kapabilitas industri keuangan.

Ekosistem yang dibentuk akan mempengaruhi sisi penawaran dan permintaan. Di sisi penawaran, OJK akan mengembangkan infrastruktur pendukung berupa produk pendanaan/investasi, teknologi dan informasi, kapasitas sumber daya manusia industri keuangan serta insentif. Di sisi permintaan, diperlukan transformasi pasar untuk meningkatkan permintaan produk/ layanan keuangan serta dukungan program riil, pengembangan industri pendukung, dan sertifikasi "green". Berbagai program juga akan dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan produk dan layanan keuangan berkelanjutan.

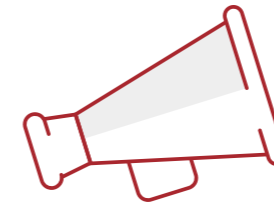
low-carbon economy (transition risk), and risk of legal loss or claims due to business activities that disregard the impact of climate change (liability risk).

To hasten the transition of the financial sector to sustainability, in this Roadmap Phase II, OJK develops an ecosystem that consists of 7 components. The seven components include policy, product, market infrastructure, coordination among ministries/institutions, non-government support, human resources, and awareness. The establishment of components in the sustainable finance ecosystem shows OJK's commitment in creating transparent regulations, building synergies with other ministries/institutions, and improving financial industry's capability.

The ecosystem that is formed will affect the supply and demand side. On the supply side, OJK will develop supporting infrastructure in the form of funding/investment products, technology and information, financial industry's human resource capacity and incentives. On the demand side, there is a great need for market transformation to increase demand for financial products services, supported by real programs, development of supporting industries, and "green" certification. Various programs will also be carried out to increase public awareness of sustainable financial products and services.

Adapun beberapa prioritas yang akan menjadi landasan pengembangan keuangan berkelanjutan ke depan, yaitu pengembangan taksonomi hijau; implementasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola; pelaksanaan program riil; inovasi produk dan layanan keuangan serta kampanye nasional keuangan berkelanjutan.

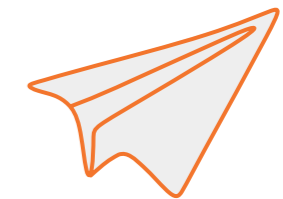
There are several priorities that will become the foundation for future development of sustainable finance, namely the development of a green taxonomy; implementation of environmental, social and governance aspects; implementation of real programs; innovation of financial products and services; and national campaigns.



Meningkatkan Kesadaran / Increasing Awareness



Celah / Gap



Mempercepat Transisi menuju Keberlanjutan / Accelerating the Transition to Sustainability

Meningkatkan Kesadaran / Increasing Awareness	Celah / Gap	Mempercepat Transisi menuju Keberlanjutan / Accelerating the Transition to Sustainability
<ol style="list-style-type: none"> Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap I (2015 - 2019). <i>Sustainable Finance Roadmap Phase I (2015 - 2019).</i> Pengenalan prinsip keuangan berkelanjutan. <i>Introduction of sustainable finance principles.</i> Pengenalan kategori kegiatan usaha berkelanjutan. <i>Introduction of sustainable business activities category.</i> Pengembangan insentif. <i>Development of incentive schemes.</i> Program pengembangan kapasitas. <i>Capacity building programs.</i> 	<ol style="list-style-type: none"> Rendahnya pemahaman industri. <i>Low awareness of the industry.</i> Belum adanya standarisasi hijau. <i>Unavailability of green standard.</i> Peluang besar yang belum dimanfaatkan. <i>Untapped opportunities.</i> Belum terintegrasinya risiko LST. <i>ESG risk has not been integrated.</i> Peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan K/L. <i>Improvement on coordination and collaboration with ministries/institutions.</i> 	<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan di sisi Penawaran: <ul style="list-style-type: none"> Skema insentif, Inovasi produk, Teknologi dan informasi, Pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Supply side development: <ul style="list-style-type: none"> Incentive schemes, Product innovation, Information and technology, Capacity building. Pengembangan di sisi Permintaan: <ul style="list-style-type: none"> Kampanye nasional, Dukungan program riil, Pengembangan industri pendukung, Sertifikasi "green". Demand side development: <ul style="list-style-type: none"> National campaign, Real programs, Development of supporting industries, "Green" certification.

1 THE FUTURE IS NOW



“Our biggest challenge in this new century is to take an idea that seems abstract – sustainable development – and turn it into a reality for all the world’s people”
(Kofi Annan, Former UN Secretary General)

Keuangan Berkelanjutan Indonesia Saat Ini

Arah pertumbuhan perekonomian yang lebih bertanggung jawab telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, OJK telah menyusun *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap I (2015 - 2019) sebagai langkah awal meningkatkan kesadaran dan kapasitas Industri Jasa Keuangan (IJK) untuk menerapkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) serta melakukan adaptasi perubahan iklim menuju ekonomi rendah karbon.

Keuangan Berkelanjutan merupakan suatu dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.¹ Tantangan terbesar dalam menerapkan keuangan berkelanjutan adalah meyakinkan pelaku usaha dan masyarakat bahwa upaya untuk menghasilkan keuntungan akan lebih baik dan langgeng jika dilakukan dengan mempertimbangkan sumber daya alam dan dampak sosial kepada masyarakat. Hal ini yang dikenal sebagai prinsip *profit, people, planet* (3P). Dengan demikian, diperlukan sebuah inisiatif yang dapat mengubah pola pikir pelaku usaha dari mengejar keuntungan jangka pendek menjadi kemakmuran jangka panjang.

Sustainable Finance in Indonesia: The Current Journey

A responsible economy has become an integral part of sustainable development goals. In this regard, OJK released the *Sustainable Finance Roadmap Phase I (2015 - 2019)* as an initial step to increase financial institutions' (FIs) awareness and capacity to implement environmental, social, and governance (ESG) aspects as well as to adapt to climate change towards a low carbon economy.

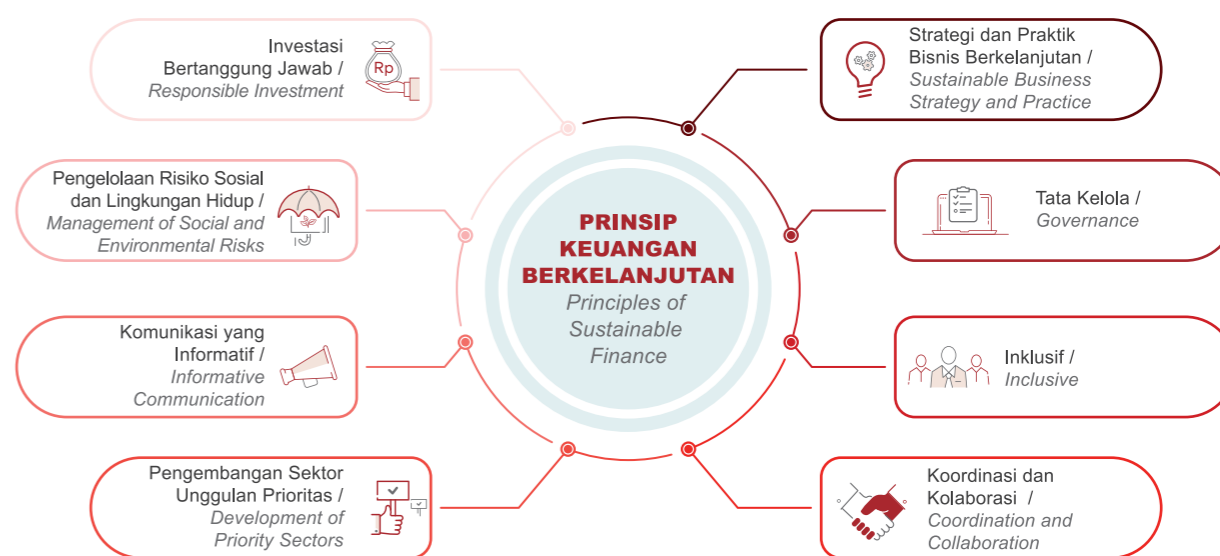
Sustainable Finance is comprehensive support from the financial services sector to achieve sustainable economic growth by aligning economic, social, and environmental interests.¹ The greatest challenge to implement sustainable finance is to convince business players and society that in performing activities that generate profits, limited natural resources and the social impacts on society need to be considered. This is known as the profit, people, and planet (3P) principle. Thus, there is a need for an initiative to change the mindset of business players from pursuing short-term profits into long-term prosperity.

Roadmap Tahap I telah menghasilkan beberapa inisiatif yang menjadi fondasi bagi perubahan pola pikir pelaku usaha. Pertama, OJK memperkenalkan delapan prinsip Keuangan Berkelanjutan (Gambar 1).² Delapan prinsip ini menjadi pertimbangan utama bagi pelaku di industri keuangan dalam arah pengembangan kegiatannya. Kedua, OJK mewajibkan pelaku di industri jasa keuangan untuk menyusun laporan yang berisi tentang penerapan prinsip-prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam rencana bisnis serta kewajiban penyampaian laporan kepada publik mengenai penerapan prinsip LST tersebut.³ Ketiga, OJK telah menyusun Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Gambar 2).⁴ Kategori ini akan menjadi acuan pengelompokan sektor hijau bagi industri keuangan sehingga akan meningkatkan portofolio layanan dalam pengembangan keuangan berkelanjutan.

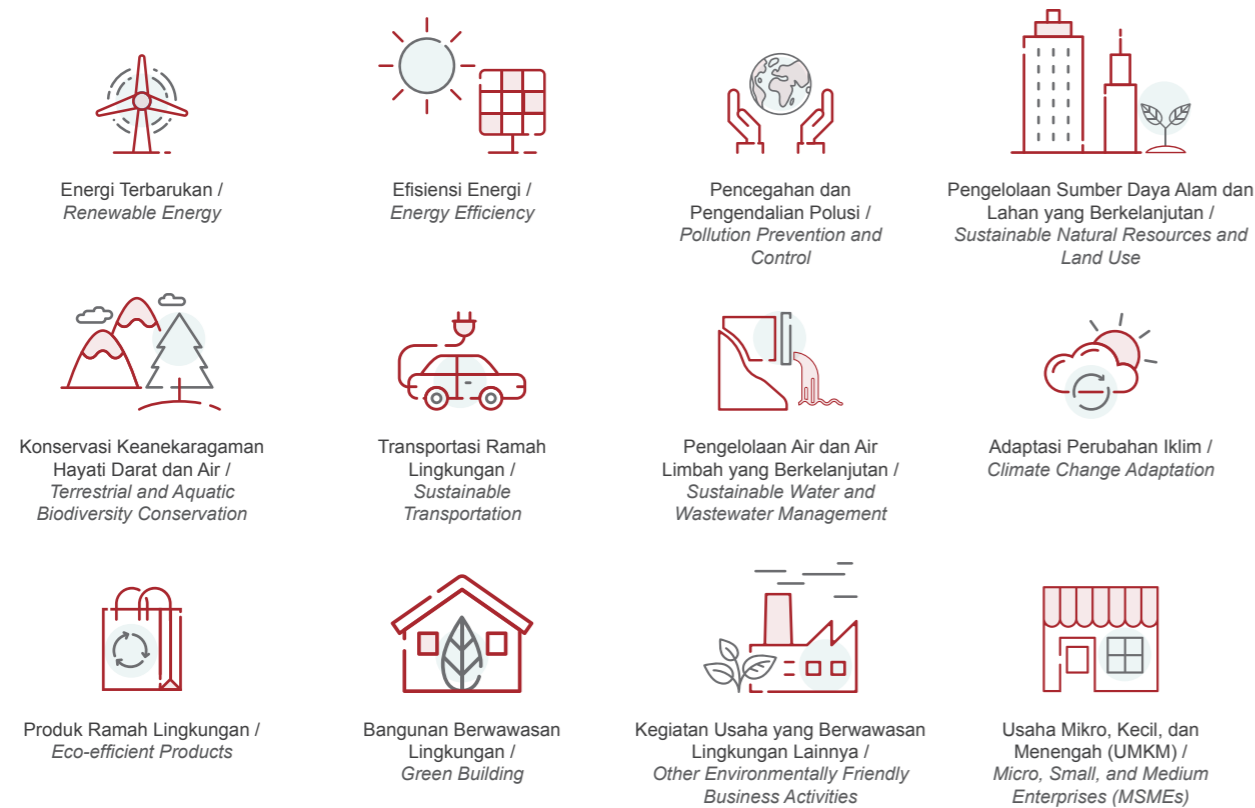
Untuk menarik minat industri, OJK juga telah menerbitkan aturan serta insentif bagi penerbitan obligasi/sukuk hijau.⁵ Peraturan ini telah dimanfaatkan untuk mengeluarkan obligasi hijau senilai USD3,72 miliar. OJK juga memberikan insentif bagi pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.⁶ Selain itu, OJK juga telah melakukan serangkaian sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman industri terhadap kegiatan ekonomi yang bertanggung jawab.

The Phase I Roadmap has resulted in several initiatives that become the foundation to shift the business players' mindset. First, OJK introduced eight principles of Sustainable Finance (Figure 1).² These eight principles serve as the basis for financial industry players in developing their activities. Second, OJK requires players in the financial services industry to devise a strategy that contains the implementation of environmental, social, and governance principles in their business plan and to submit a public report containing the implementation of the ESG principles.³ Third, OJK has classified a number of Sustainable Business Activities Categories (Figure 2).⁴ This category will serve as a reference for classification of the green sector for the financial industry in the hope that it will expand the portfolio to support sustainable finance development.

In order to raise interest of the industry on sustainable finance, OJK also issued a regulation, coupled with incentives, for issuing green bonds/sukuk.⁵ This regulation has been utilized through issuance of numerous green bonds amounting to USD3.72 billion. Further, OJK also provides incentives for the development of battery electric vehicles.⁶ In addition, OJK also conducted a series of awareness programs to improve the industry's understanding on responsible economic activities.



Gambar 1. Prinsip Keuangan Berkelanjutan Indonesia / Figure 1. Principles of Sustainable Finance in Indonesia.



Gambar 2. Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan
Figure 2. Sustainable Business Activities Category

OJK melihat industri merespons *Roadmap* ini dengan baik. Delapan bank yang tergabung sebagai *first movers* telah membentuk Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (IKBI). Inisiatif ini merupakan komitmen nyata dari industri perbankan dalam mendukung pembiayaan hijau. Saat ini, keanggotaan IKBI telah berkembang menjadi 15 lembaga.⁷ Selanjutnya, pada tahun 2017 OJK bekerja sama dengan Universitas Udayana telah mendirikan Bali Center for Sustainable Finance (BCSF) yang menjadi pelopor pusat riset bagi pengembangan dan penelitian mengenai keuangan berkelanjutan.

Capaian implementasi *Roadmap* ini (Gambar 3) juga telah mendapatkan apresiasi dari dunia internasional. Sustainable Banking Network (SBN) di tahun 2019 memasukkan Indonesia bersama Tiongkok dalam tahap *maturing* dalam konteks regulasi mengenai keuangan berkelanjutan, yakni menjadi negara yang dikategorikan penggerak utama (*first movers*). Survei oleh GlobeScan dan Global Reporting Initiative (GRI) juga menempatkan Indonesia di peringkat teratas untuk kebenaran/kejujuran atas informasi yang disampaikan di Laporan Keberlanjutan (*sustainability report*) perusahaan yang disampaikan kepada publik.

We see that the industry responding positively to this Roadmap. The eight banks that initially joined as first movers created the Indonesia Sustainable Finance Initiative (IKBI). This is a testament to banking industry's commitment to supporting green financing. The current membership of IKBI has expanded to 15 institutions.⁷ Further, in 2017, OJK collaborated with Udayana University to establish the Bali Center for Sustainable Finance (BCSF) that works as a pioneer research center for the development and studies on sustainable finance.

Achievements in the implementation of this Roadmap (Figure 3) have also gained appreciation from the international community. The Sustainable Banking Network (SBN) in 2019 classified Indonesia and the People's Republic of China as countries in the maturing stage in the context of regulations on sustainable finance, in other words, countries in the first movers category. A survey conducted by GlobeScan and the Global Reporting Initiative (GRI) ranks Indonesia at the top for honest disclosure of information presented in the company's sustainability reports that are made available to public.

Kebutuhan Pengembangan ke Depan

Meningkatnya kesadaran akan pentingnya pertumbuhan yang bertanggung jawab serta peluang investasi hijau secara global, mendorong penerapan keuangan berkelanjutan ke tahap selanjutnya. Hal ini sekaligus merupakan kontribusi sektor jasa keuangan dalam upaya pemenuhan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan komitmen Indonesia dalam *Paris Agreement*.⁸

Penerapan keuangan berkelanjutan merupakan suatu program besar dan memerlukan langkah-langkah yang tertata dengan baik. Kelalaian dalam melakukan pertumbuhan yang bertanggung jawab akan menimbulkan biaya yang besar. Penelitian dari University of California, Berkeley menyatakan bahwa apabila perubahan iklim tidak dimitigasi dengan baik dapat menyebabkan penurunan PDB sebesar 23% di tahun 2100.⁹

Data Bappenas menyebutkan bahwa Indonesia membutuhkan pembiayaan/ investasi di sektor berkelanjutan hingga 2030 sebesar Rp67.803 triliun. Hal ini merupakan peluang bagi industri jasa keuangan untuk terlibat dalam pendanaan berkelanjutan. Industri jasa keuangan juga dapat memanfaatkan perubahan kecenderungan global dalam berinvestasi. Semakin banyak investor yang mensyaratkan penanaman investasinya pada produk hijau. Selain itu, kita juga menyaksikan meningkatnya permintaan akan produk dan jasa yang ramah lingkungan. Situasi pandemi Covid-19 yang sedang terjadi telah membuka mata kita bahwa penerapan keuangan berkelanjutan sebagai pendukung pertumbuhan yang bertanggung jawab harus dipercepat.

The Next Journey

Increased awareness on the importance of responsible development and global opportunities for green investment have pushed the implementation of sustainable finance to the next level. This is a contribution from the financial services sector to the country's effort on achieving 17 Sustainable Development Goals (SDGs) and its commitment to meeting the Paris Agreement targets.⁸

The implementation of sustainable finance is a major program that requires well managed steps. Failure to undertake responsible development will come at great costs. Research from the University of California, Berkeley shows that if climate change is not properly mitigated, it could lead to a 23% decline in GDP by 2100.⁹

Data from the National Development Planning Agency showed that Indonesia's need for green financing/investment until 2030 was estimated around Rp67,803 trillion. This presents an opportunity for financial institutions to take part in sustainable development through sustainable financing. Financial institutions could also take advantage of the changing global trend in investing. More and more investors require their investments to be placed in green products. In addition, we are also witnessing a rising demand for environmentally friendly products and services. The current Covid-19 pandemic situation has made us realize that the implementation of sustainable finance in supporting responsible growth must be accelerated.

“Tidak dimitigasinya perubahan iklim dapat menyebabkan penurunan PDB sebesar 23% di tahun 2100”
(University of California, Berkeley, 2015)

Roadmap Keuangan Berkelanjutan / Sustainable Finance Roadmap (2015 - 2019)

1. Awareness Program
2. Green Lending Model
3. Capacity Building

Kesepakatan Global Perubahan Iklim / Global Agreement on Climate Change. Paris Agreement on Climate Change 2015-2030 (UU 16/2016 Ratifikasi Paris Agreement / Law No. 16/2016 on Paris Agreement Ratification)
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDGs). UN Sustainable Development Goals (SDGs) 2015-2030 (Perpres 59/2017 SDGs / Presidential Decree No. 59/2017 SDGs)

Indonesia Menjadi pendiri dan anggota dari Sustainable Banking Network (SBN) IFC World Bank / Indonesia becomes a founder and a member of Sustainable Banking Network (SBN) IFC World Bank.

1. POJK (OJK Regulation) No. 51/POJK.03/2017 (Ketentuan mengenai Keuangan Berkelanjutan / OJK Regulation on Sustainable Finance).
2. POJK (OJK Regulation) No. 60/POJK.04/2017 Green Bond / OJK Regulation on Green Bond.

1. Indonesia menjadi *First Mover* untuk inisiatif Keuangan Berkelanjutan di *Emerging Countries* / Indonesia becomes a *first Mover* for sustainable finance initiative in *Emerging Countries*.
2. Implementasi POJK 51 bagi Bank / Implementation of OJK Regulation No. 51 for banks.
3. *Monitoring action plan* bagi Bank / *Monitoring action plan* for banks.
4. Persiapan *Roadmap Tahap II (2021 - 2025)* / Preparing *Roadmap Phase II (2021 - 2025)*.

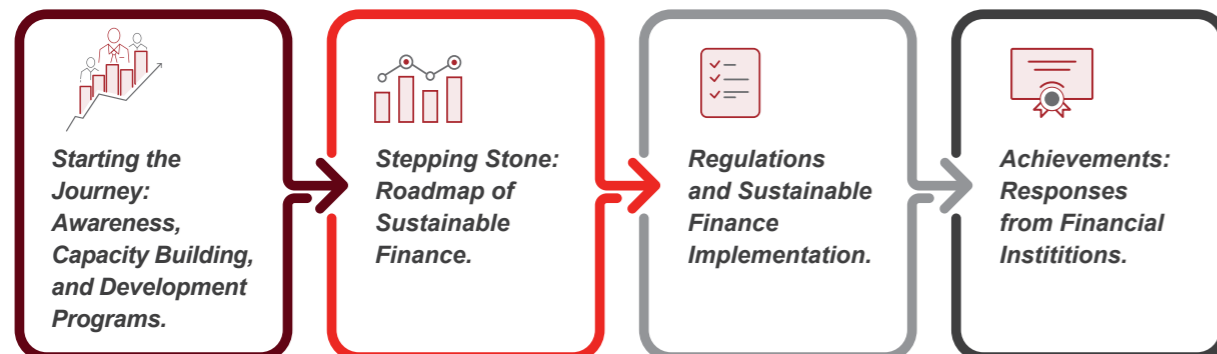


OJK mempersiapkan *Roadmap Keuangan Berkelanjutan* / OJK is preparing the *Sustainable Finance Roadmap*.

1. *Sustainable Finance Award (SFA)*.
2. *Pilot Project The First Movers on Sustainable Banking*.
3. *Pilot Project Bali Center for Sustainable Finance (OJK - Universitas Udayana)*.
4. *Sustainable Finance Information Hub*.

1. Penerbitan Pertama *Green Bond / Sukuk* oleh pemerintah dan IJK / *Issuance of the first Green Bond/Sukuk by the Government and financial institutions*.
2. Pedoman Teknis Implementasi POJK No. 51 tahun 2017 bagi Bank / *Technical guidelines for the implementation of OJK Regulation No. 51/2017 for banks*.
3. Terbentuknya Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (alumni *First Movers*) / *The establishment of Indonesia Sustainable Finance Initiative (alumni of First Movers)*.
4. Pengenalan Skema *Blended Finance* / *Introduction of Blended Finance Scheme*.

Keterangan Warna
Color Description



Portofolio Hijau (<i>Green Loans</i>)*	Rp809,75 Triliun** / USD55,8 Miliar (IDR809.75 Trillion / USD55.8 Billion)
<i>Global Sustainability Bond</i>	Rp7,9 Triliun (IDR7.9 Trillion)
<i>Green and Gender Bond</i>	Rp59,9 Triliun (IDR59.9 Trillion)
Pembiayaan Campuran (<i>Blended Finance</i>)	Rp35,6 Triliun (IDR35.6 Trillion)
TOTAL	Rp913,15 Triliun (IDR913.15 Trillion)

* Berdasarkan data RAKB dan hasil survei bulan November 2020.
 ** Kurs Oktober 2018 (14.480)

Gambar 3. Capaian Keuangan Berkelanjutan di Indonesia
 Figure 3. Achievements of Sustainable Finance in Indonesia

2

SPEEDING UP SUSTAINABLE FINANCE



“**There is an opportunity in the recovery from the COVID-19 crisis to create a new approach to growth that is sustainable, inclusive and resilient**”

(Nicholas Stern, Professor of Economics and Government at the LSE, 2020)

Mengubah Tantangan menjadi Peluang

Pandemi Covid-19 telah menjadi krisis pertama kali pada abad ke-21 yang bersifat multidimensi dan berpengaruh kepada semua negara pada saat yang bersamaan. Namun, pandemi ini tidak terlepas dari kelalaian kita dalam menjaga kelestarian lingkungan. Saat inilah kesempatan terbaik untuk kita bersama-sama dapat memperbaiki proses bisnis di seluruh sektor usaha, terutama di sektor keuangan yang lebih berkelanjutan.

Di samping itu, dengan adanya kemajuan teknologi yang telah mengubah proses bisnis ke arah digital, sektor usaha diharapkan mampu untuk mengoptimalkan kemajuan teknologi tersebut. Perkembangan teknologi diharapkan mampu mengembangkan proses bisnis, meningkatkan efisiensi, dan mempercepat arus informasi. Industri keuangan dapat memanfaatkan kemajuan teknologi dalam mempermudah pemberian layanan pembiayaan/pendanaan hijau, peningkatan efisiensi proses bisnis, dan inovasi produk yang ramah lingkungan. Sementara itu, pemanfaatan teknologi akan meningkatkan efisiensi dan akurasi informasi dalam pelaporan industri keuangan serta mempermudah proses pengawasan bagi regulator. Investor juga akan mendapatkan manfaat berupa kemudahan akses informasi lingkungan, sosial, dan tata kelola yang digunakan dalam pengambilan keputusan investasi. Teknologi juga digunakan

Transforming Challenges into Opportunities

The Covid-19 pandemic has become the first crisis in the 21st century that is multidimensional and affects all countries at the same time. However, this pandemic cannot be separated from our negligence in protecting the environment. This is the best opportunity for all of us to come together to improve business processes in all business sectors, especially in a more sustainable financial sector.

In addition, business sector is expected to optimize technological advances resulting from technological developments that have transformed business processes into digital. Technology development is expected to enhance business processes, increase efficiency, and accelerate flow of information. In the context of sustainable finance, financial industry can make use of technological advances in facilitating the provision of green financing/financing services, increasing the efficiency of business processes, and enhancing innovation in environmentally friendly products. Meanwhile, the use of technology will increase the efficiency and accuracy of information in financial industry reporting and simplify the supervisory process for regulators. Investors will also benefit from easy access to environmental, social, and governance information used in making investment decisions. Technology is also used to simplify

untuk mempermudah proses edukasi untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan berkelanjutan.

Dampak pandemi Covid-19 dan kemajuan teknologi akan mendukung percepatan implementasi keuangan berkelanjutan. Namun demikian, implementasi keuangan berkelanjutan di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

1. Rendahnya tingkat pemahaman dan partisipasi industri keuangan. Industri keuangan masih memiliki persepsi bahwa pelaksanaan usaha berkelanjutan akan menimbulkan biaya tambahan. Selain itu, para pelaku usaha umumnya masih berorientasi pada keuntungan jangka pendek.
2. Belum tersedianya standarisasi kategori hijau yang diperlukan dalam penilaian implementasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Saat ini, setiap lembaga masih menggunakan standar usaha berkelanjutan masing-masing. Kondisi ini menyebabkan kegiatan usaha mengalami kendala dalam akses pendanaan dan menyulitkan investor dalam membuat keputusan berinvestasi. Oleh karena itu, perlu tersedianya standarisasi kategori hijau/taksonomi secara nasional sebagai dasar untuk usaha maupun investasi berkelanjutan. Taksonomi juga akan memudahkan pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas pengelolaan risiko.
3. Semakin meningkatnya kesadaran dan tuntutan dalam implementasi LST menciptakan peluang bisnis bagi pelaku usaha. Peluang bisnis ini memerlukan dukungan ketersediaan infrastruktur yang memadai, bukan hanya dari regulator, tetapi juga membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari pelaku usaha dan kementerian/lembaga terkait. Kolaborasi ini telah sesuai dengan semangat yang telah dimulai dan dimotori oleh World Economic Forum (WEF), IMF, dan Bank Pembangunan Internasional yang tergabung dalam MDBs.¹⁰ Kolaborasi ini tentunya akan menjadi sebuah *common structure* bagi seluruh pihak dalam pelaksanaan inisiatif Keuangan Berkelanjutan di Indonesia.

the educational process to increase sustainable financial literacy and inclusion.

Lessons learned from the Covid-19 pandemic combined with technological advances will support the acceleration of the implementation of sustainable finance. However, the implementation of sustainable finance in Indonesia is still faced with several challenges, including:

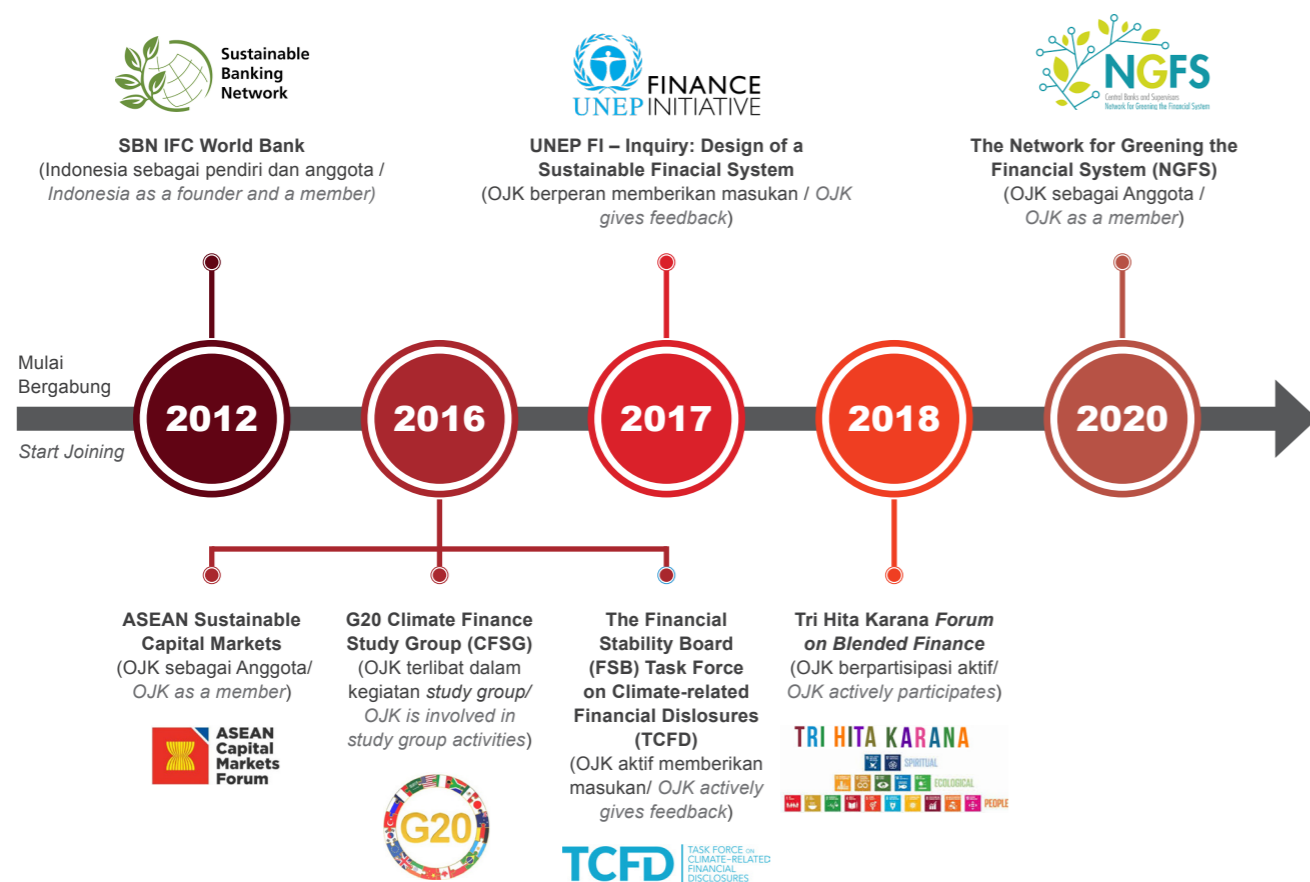
1. *Low level of understanding and participation of the financial industry. The financial industry is still of the view that implementing a sustainable business translates into additional costs. Further, business actors are in general still oriented towards short-term profits.*
2. *There is a lack of established green standards required in assessment of implementation of environmental, social, and governance aspects. Currently, each institution is using its own sustainable business standards. This hinders businesses' efforts in accessing funding and makes it difficult for investors to make investment decisions. Therefore, it is necessary to put in place green standards/national taxonomy as a basis for sustainable business and investment. A taxonomy will also make it easier for business actors to improve the quality of risk management.*
3. *Increasing awareness and demand for ESG implementation create business opportunities for business actors. This business opportunity requires adequate infrastructures, not only from regulators, but also from business actors and related ministries/institutions in forms of support and collaboration. This collaboration is in line with the spirit adopted by the World Economic Forum (WEF), IMF, and International Development Banks, which are members of the MDBs.¹⁰ This collaboration will certainly be a "common structure" for all parties in implementing the Sustainable Finance initiative in Indonesia.*

Dalam mengatasi *gap* implementasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola, OJK dengan dukungan industri dan kementerian/lembaga terkait akan membuat bauran strategi dalam suatu ekosistem dengan mengacu pada paradigma baru terkait dengan bisnis, peluang, dan manajemen risiko.

To address gaps in the implementation of environmental, social, and governance aspects, OJK – with the support of industry and related ministries/institutions – will create a mixed strategy in an ecosystem following the new paradigms related to business, opportunities, and risk management.

Keanggotaan Indonesia dalam berbagai fora internasional juga memberikan manfaat dalam pengembangan inisiatif keuangan berkelanjutan (Gambar 4). Mayoritas fora internasional tersebut beranggotakan institusi keuangan dan regulator yang mempunyai tujuan sama, yaitu menghidupkan sistem keuangan serta mobilisasi arus modal untuk investasi berkelanjutan.

Indonesia's membership in various international forums is proven to be beneficial in developing the sustainable finance initiative (Figure 4). Majority of these international forums consist of financial institutions and regulators with a common goal, namely to green the financial system and mobilize capital flows for sustainable investment.



Gambar 4. Fora Internasional mengenai Inisiatif Keuangan Berkelanjutan
Figure 4. International Forums regarding Sustainable Finance Initiative

“Once climate change becomes a defining issue for financial stability, it may already be too late”

(Mark Carney, Former Governor of the Bank of England)

Membangun Ekosistem Keuangan Berkelanjutan

Indonesia adalah negara dengan sumber daya alam yang melimpah, hutan hujan tropis yang luas, keanekaragaman hayati yang sangat besar, ketersediaan sumber daya air dan sinar matahari sepanjang tahun.¹¹ Oleh karena itu, sumber daya alam Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia.

Untuk mempercepat implementasi LST, kita perlu mempersiapkan inisiatif yang mendukung inovasi-inovasi yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kondisi ini menjadi dasar penyusunan *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021 - 2025) yang telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari cetak biru pengembangan sektor jasa keuangan Indonesia ke depan.¹²

Inisiatif keuangan berkelanjutan yang dikembangkan dalam *Roadmap* Tahap II akan mengintegrasikan tujuh komponen dalam satu kesatuan ekosistem. Adapun tujuh komponen keuangan berkelanjutan (Gambar 5) terdiri dari:

1. **Kebijakan;** menyediakan pengembangan berbagai kebijakan untuk mendukung keuangan berkelanjutan.
2. **Produk;** mengembangkan berbagai jenis produk dan layanan keuangan berkelanjutan.
3. **Infrastruktur Pasar;** mengembangkan infrastruktur teknologi dan informasi yang mendukung keuangan berkelanjutan.
4. **Koordinasi Kementerian/Lembaga (K/L) terkait;** meningkatkan koordinasi dan pertukaran informasi antar kementerian/ lembaga serta pemangku kepentingan lainnya.

Building the Ecosystem

Indonesia is a country with plentiful natural resources, extensive tropical rainforests, enormous biodiversity, year-round sunshine, and abundant water resources.¹¹ Therefore, Indonesia's natural resources play a highly important role in supporting Indonesia's economic growth and development.

To accelerate ESG implementation, we need to prepare initiatives, which support innovations that are in line with the Sustainable Development Goals. This is the foundation for the Sustainable Finance Roadmap Phase II (2021 - 2025), which has become an integral part of the blueprint for future development of Indonesia's financial services sector.¹²

The sustainable finance initiative developed through the Roadmap Phase II will integrate seven major components in one ecosystem, which consist of the following (Figure 5):

1. **Policy;** developing various policies to support sustainable finance.
2. **Products;** developing various types of sustainable financial products and services.
3. **Market Infrastructure;** developing technology and information infrastructures supporting sustainable finance.
4. **Coordination among related Ministries/ Institutions;** improving coordination and exchange of information among ministries/ institutions and other stakeholders.

5. **Dukungan Non-pemerintah;** dukungan dari sisi *supply* dan *demand*, dukungan riset (tenaga ahli, lembaga riset, dan universitas), dan lembaga internasional serta keanggotaan dalam fora internasional untuk pengembangan inisiatif keuangan berkelanjutan.
 6. **Sumber Daya Manusia;** mengembangkan kapasitas internal dan eksternal melalui program *capacity building* yang masif dan terstruktur.
 7. **Awareness;** melalui pengembangan strategi komunikasi inisiatif keuangan berkelanjutan kepada industri keuangan, pemangku kepentingan terkait, dan masyarakat.
5. **Non-governmental Support;** support from the supply and demand side, research (experts, research centers, and universities), and international institutions as well as membership in international forums for further development of sustainable finance initiatives,
 6. **Human Resources;** developing internal and external capacity through massive and structured capacity building programs.
 7. **Awareness;** through developing a communication strategy for sustainable finance initiative to reach out to financial industry and related stakeholders.



Gambar 5. Ekosistem Keuangan Berkelanjutan Indonesia
Figure 5. Ecosystem of Sustainable Finance in Indonesia

3 CREATING THE FUTURE



“**Saya berharap dapat menyambut Anda di Indonesia untuk berinvestasi di masa depan di mana energi terbarukan dan teknologi bersih menciptakan kehidupan berkelanjutan,**”
(Presiden Joko Widodo dalam Abu Dhabi Sustainability Week, 13 Januari 2020)

Perubahan paradigma *business as usual* ke arah berkelanjutan telah menjadi kebutuhan masa depan. Meningkatnya risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola menjadi tantangan bagi industri keuangan untuk menciptakan peluang usaha baru yang inovatif dan mendukung ekonomi berkelanjutan. Tantangan terhadap kegiatan usaha berkelanjutan dapat difasilitasi dengan membentuk ekosistem keuangan berkelanjutan yang terdiri dari 7 komponen (Gambar 6).

Ekosistem yang dijabarkan dalam 7 komponen ini merupakan komitmen OJK dalam mewujudkan regulasi yang transparan, membangun sinergi kerja sama dengan kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan terkait serta meningkatkan kapabilitas industri keuangan.

A change in paradigm from business as usual to sustainability has become a necessity for the future. Increasing environmental, social, and governance risks pose a challenge for the financial industry to create new, innovative business opportunities that support a sustainable economy. Challenges in sustainable business activities could be addressed through establishing a sustainable financial ecosystem that consists of seven components (Figure 6).

The ecosystem, described in 7 components, is OJK's commitment to realizing transparent regulations, building synergies in cooperation with relevant ministries/agencies and stakeholders, and increasing the capabilities of the financial industry.



KEBIJAKAN / POLICIES

- *Green Taxonomy* (2021 - 2022)
- *Integrasi Aspek LST / ESG Integration* (2021 - 2023)
- *Key Performance Indicator (KPI)* (2021 - 2023)
- *Pengembangan Insentif / Developing Incentives* (2021 - 2025)
- *Panduan Implementasi Keuangan Berkelanjutan di Pasar Modal dan IKNB / Guidance of Sustainable Finance Implementation in the Capital Market and NBF* (2021 - 2022)

INFRASTRUKTUR PASAR / MARKET INFRASTRUCTURE

- *Pengembangan Sustainable Finance Information Hub (SFIH) / Development of Sustainable Finance Information Hub* (2021 - 2025)
- *Pengembangan primary dan secondary market / Development of primary and secondary market* (2022 - 2025)

DUKUNGAN NON PEMERINTAH / NON-GOVERNMENT SUPPORT

- *Pengembangan Pusat Riset / Developing Research Centers* (2022 - 2025)
- *Realisasi Program Riil / Real Programs* (2021 - 2025)

AWARENESS

- *Buku Acuan Kredit/ Pembiayaan/ Investasi Sektoral / Guide Book of Credit/Financing/ Investment in Sectors* (2021 - 2025)
- *National Campaign - Indonesia Sustainability Week* (2021 - 2024)
- *Program Inklusi Keuangan Berkelanjutan / Sustainable Finance Inclusion Program* (2022 - 2025)
- *Sustainable Finance Award (SFA)* (2024 - 2025)
- *Publikasi Informatif untuk Investor Baru / Informative Publications for New Investors* (2022 - 2025)



PRODUK / PRODUCT

- *Pengembangan Infrastruktur Penunjang / Developing Supporting Infrastructure* (2021 - 2025)
- *Pengembangan Inovasi Produk / Product Innovation* (2021 - 2025)

KOORDINASI K/L / COORDINATION AMONG MINISTRIES/INSTITUTIONS

- *Task Force Nasional / National Task Force* (2021 - 2025)
- *Monitoring dan Evaluasi Implementasi Keuangan Berkelanjutan / Monitoring and Evaluation of the Implementation of Sustainable Finance* (2021 - 2025)

SDM / HUMAN RESOURCES

- *Training Keuangan Berkelanjutan (TKB) dan Training of Trainers (TOT) / Sustainable Finance Training and Training of Trainers* (2021 - 2025)
- *E-learning* (2024 - 2025)



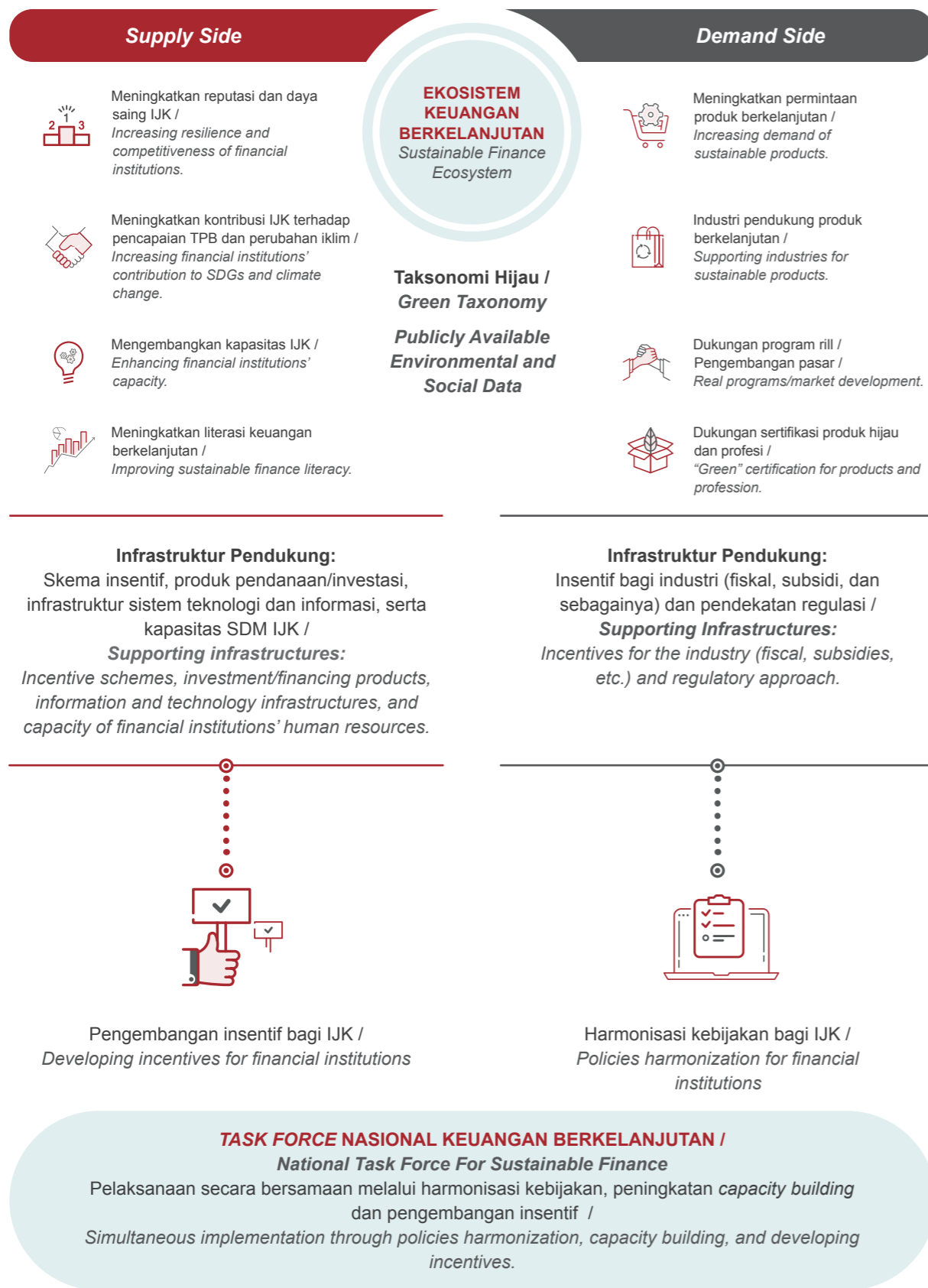
Menangkap Peluang Pendanaan

Pembentukan ekosistem keuangan berkelanjutan akan mempengaruhi sisi permintaan maupun penawaran. Perubahan tren global akan meningkatkan permintaan masyarakat terhadap produk yang mengintegrasikan aspek LST sehingga perlu segera diantisipasi oleh sektor jasa keuangan. Selain itu, permintaan investor untuk menanamkan investasinya pada produk hijau juga semakin meningkat.¹³ Untuk merespons permintaan tersebut, di sisi penawaran, OJK akan mengembangkan infrastruktur pendukung, antara lain pengembangan produk dan skema inovatif pembiayaan¹⁴, pengembangan infrastruktur teknologi dan informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia industri keuangan, dan pengembangan skema insentif prudensial dan non-prudensial. Pengembangan hal-hal tersebut memerlukan dukungan taksonomi hijau, ketersediaan data, dan kolaborasi di tingkat nasional antara kementerian dan lembaga serta koordinasi dengan lembaga multilateral (Gambar 7).

Seizing Funding Opportunities

The establishment of a sustainable finance ecosystem will affect both the demand and supply side. Changes in global trends will increase public demand for products that integrate ESG aspects. This is something the financial industry needs to anticipate immediately. In addition, investor's demand to invest in green products is also increasing¹³. To respond to this demand, on the supply side, OJK will develop supporting infrastructure, including product development and innovative financing schemes¹⁴, development of technology and information infrastructure, enhancement of human resource capacity in the financial industry, and development of prudential and non-prudential incentive schemes. All this must be supported by green taxonomy, availability of data, and collaboration at the national level among ministries and agencies as well as coordination with multilateral agencies (Figure 7).

Gambar 6. Detail Pengembangan Inisiatif Keuangan Berkelanjutan (2021 - 2025)
Figure 6. Details of the Development of the Sustainable Finance Initiative (2021 - 2025)



Gambar 7. Keseimbangan Sisi Supply dan Demand Keuangan Berkelanjutan
Figure 7. Balance of the Supply and Demand of Sustainable Finance



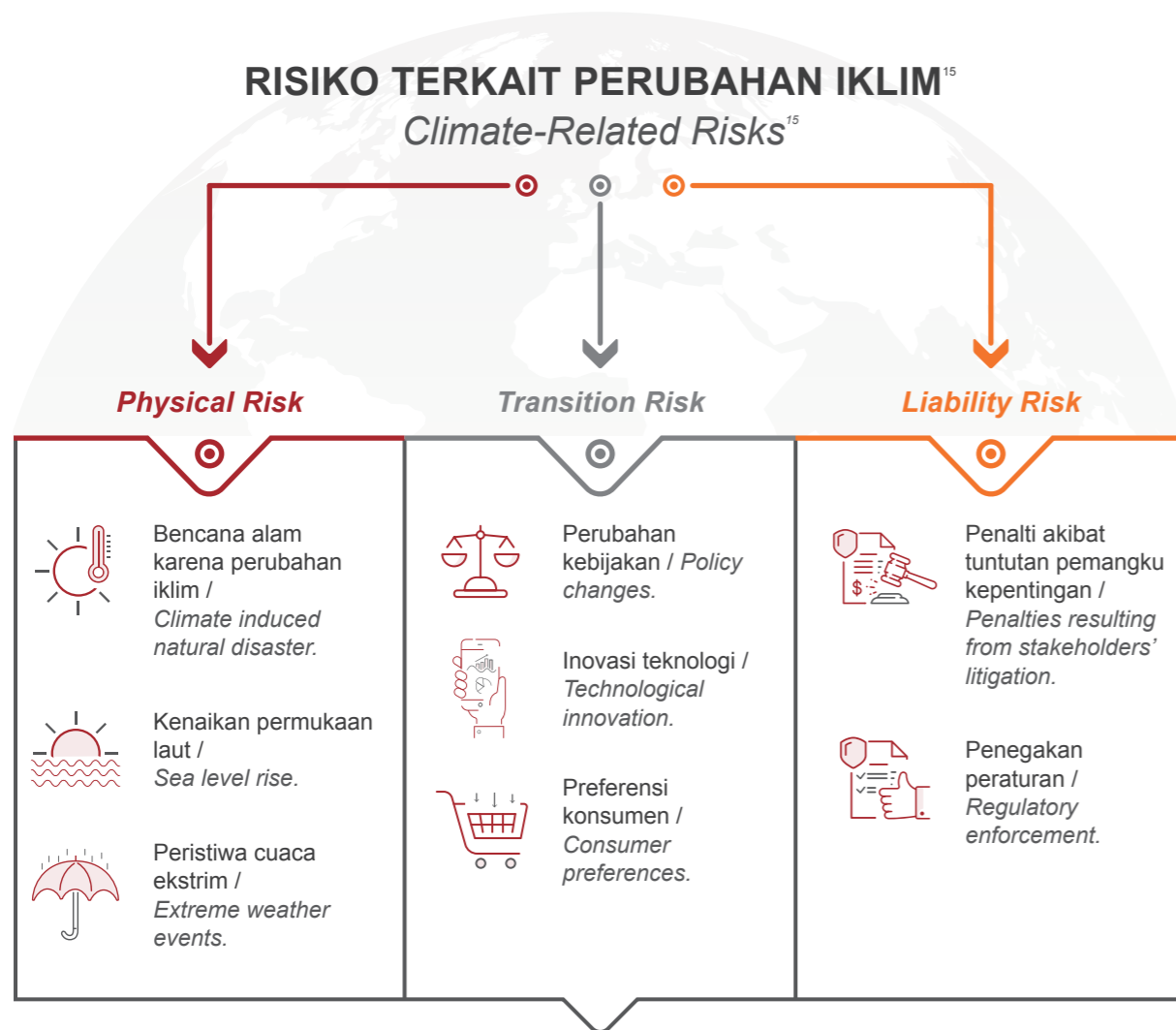
Proses transisi menuju ekonomi rendah karbon tidak terlepas dari risiko. Oleh karena itu, peralihan ini harus dilakukan secara tertata sehingga risiko dapat ditangani dengan baik. Risiko tersebut dapat berupa *physical risk*, *transition risk*, dan *liability risk*. *Physical risk* timbul akibat fenomena perubahan iklim yang dapat menimbulkan kerusakan properti, menurunkan produktivitas, dan mengganggu proses bisnis. Dalam proses transisi, terdapat risiko yang perlu dimitigasi (risiko transisi) seperti perubahan kebijakan, pengembangan teknologi, dan perilaku konsumen. *Liability risk* muncul dalam bentuk kerugian hukum dan klaim akibat tidak mempertimbangkan perubahan iklim (Gambar 8).

Dalam penerapan ekosistem tersebut, OJK akan menyelaraskan dengan aturan-aturan sesuai dengan *standard setting bodies* untuk memitigasi risiko yang muncul sehingga proses transisi ini tidak menimbulkan instabilitas ekonomi yang tidak diinginkan.

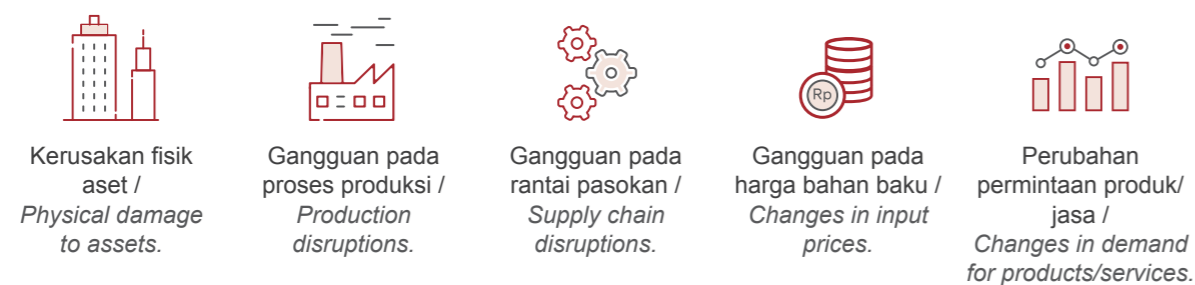
Transitioning to a low-carbon economy is not without risks. Therefore, this transition must be carried out in an orderly manner so that risks can be managed properly. These risks are physical risk, transition risk, and liability risk. Physical risk stems from climate change phenomena that could cause property damage, reduce productivity, and disrupt business processes. During transition process, there are also risks that need to be mitigated (transition risk), such as changes in policy, technology development, and consumer behavior. Liability risk appears in the form of legal cost and claims resulting from activities that disregard climate-related risks (Figure 8).

In implementing this ecosystem, OJK will make an alignment with the rules of standard setting bodies to mitigate risks that arise so that this transition process does not lead to unwanted economic instability.

“It’s a collective endeavor, it’s collective accountability and it may not be too late.”
 (Christine Lagarde, Former Managing Director of IMF, 2015)



Potensi Dampak Finansial / Potential Financial Impacts



Gambar 8. Risiko Terkait Perubahan Iklim
 Figure 8. Climate-related Risks

Prioritas Pengembangan Roadmap Tahap II

Kunci sukses ekosistem keuangan berkelanjutan didasarkan pada pengembangan dan implementasi tujuh komponen pendukung. Namun, diperlukan prioritas dalam penerapan ekosistem pada tahap II mencakup:

- Pengembangan taksonomi hijau** yang bertujuan mengklasifikasikan aktivitas pembiayaan dan investasi berkelanjutan di Indonesia.¹⁶ Klasifikasi ini menjadi dasar bagi seluruh pemangku kepentingan di Indonesia dalam aktivitas ekonomi yang berkelanjutan. Penyusunan taksonomi hijau tersebut dilakukan melalui pembentukan *task force* nasional keuangan berkelanjutan, yang melibatkan kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan terkait. Taksonomi yang dikembangkan akan mengakomodasi keseluruhan pedoman yang ada saat ini terkait sektor hijau.
- Implementasi aspek LST** ke dalam manajemen risiko dengan tujuan meningkatkan daya tahan serta mitigasi risiko lingkungan dan sosial yang dapat mempengaruhi proses bisnis industri keuangan. Upaya ini dilakukan melalui pelaporan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola, pengembangan *key performance indicators* serta didukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara menyeluruh.
- Pengembangan program riil** dimaksudkan untuk memberikan contoh sukses pengembangan inovatif skema hijau sehingga meningkatkan peran industri keuangan dalam pembiayaan berkelanjutan. Pelaksanaan program riil dilakukan melalui kolaborasi dengan kementerian/lembaga terkait serta pemangku kepentingan lainnya. Upaya ini sejalan dengan pengembangan sektor ekonomi unggulan pemerintah serta menjadi dasar pengembangan skema pembiayaan hijau.

Priorities in Developing the Phase II Roadmap

The key to a successful sustainable finance ecosystem is based on developing and implementing all seven supporting elements. However, priorities are needed to implement ecosystems in the phase II Roadmap, which include:

- Development of a green taxonomy**, which aims to classify sustainable financing and investment activities in Indonesia.¹⁶ This classification is the basis for all stakeholders in Indonesia in carrying out sustainable economic activities. The formulation of the green taxonomy is carried out through the formulation of a national task force of sustainable finance composed of relevant ministries/institutions and related stakeholders. The taxonomy will accommodate the overall existing guidelines regarding the green sector.
- Implementation of ESG aspects** into risk management with the aim of increasing resilience and mitigating environmental and social risks that may affect financial industry's business processes. This effort is carried out through reporting on environmental, social, and governance aspects, developing key performance indicators, and supported by increasing overall capacity of human resources.
- Real program development** is intended to present success stories of innovative green scheme development to be replicated so as to enhance the role of the financial industry in sustainable financing. The implementation of real programs is carried out in collaboration with related ministries/institutions and other stakeholders. This is in line with the development of the government's leading economic sector and serves as the basis for further development of green financing schemes.



CATATAN

Notes

¹ Definisi ini mengacu pada Pasal 1 POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.
The regulation mentioned above is OJK Regulation (POJK) Number 51/POJK.03/2017 on the Application of Sustainable Finance for Financial Services Institutions (FIs), Issuer Companies, and Public Companies.

² Delapan prinsip Keuangan Berkelanjutan telah disampaikan dalam Pasal 2 ayat (2) POJK Nomor 51/POJK/03/2017.
Eight principles of Sustainable Finance have been stated in Article 2 paragraph (2) OJK Regulation Number 51/POJK.03/2017.

³ Sesuai dengan Pasal 4 POJK Nomor 51/POJK.03/2017, Lembaga Jasa Keuangan (LJK) wajib menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB). Pasal 10 POJK Nomor 51/POJK.03/2017 menyebutkan bahwa LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik wajib menyusun Laporan Keberlanjutan. Laporan Keberlanjutan juga dipublikasikan melalui situs web LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik.
In accordance with Article 4 OJK Regulation Number 51/POJK.03/2017, Financial Services Institutions are required to prepare a Sustainable Finance Action Plan (RAKB). Article 10 OJK Regulation Number 51/POJK.03/2017 states that Financial Services Institutions, Issuer Companies, and Public Companies are required to prepare a Sustainability Report. Sustainability reports are also published through the websites of Financial Services Institutions, Issuer Companies, and Public Companies.

⁴ Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) merupakan pengkategorian kegiatan usaha berkelanjutan yang mengacu pada pasal 4 POJK Nomor 60/POJK.04/2017 Tentang Green Bond yang menjelaskan 11 (sebelas) kegiatan usaha berwawasan lingkungan (KUBL). Untuk memenuhi salah satu prinsip Keuangan Berkelanjutan, yaitu prinsip inklusif, ditambahkan 1 (satu) kategori kegiatan usaha berkelanjutan, yaitu kategori Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan demikian, kategori kegiatan usaha berkelanjutan berjumlah 12 (dua belas) kategori yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan pencatatan portofolio kredit/pembiayaan berkelanjutan.
The Sustainable Business Activities Category (KKUB) is a category that refers to Article 4 OJK Regulation Number 60/POJK.04/2017 concerning Green Bond which describes 11 (eleven) environmentally friendly business activities (KUBL). To fulfill one of the principles of Sustainable Finance, namely the principle of inclusion, 1 (one) category of sustainable business activity is added, which is Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). Thus, there are 12 (twelve) sustainable business activities categories that are used as a reference for sustainable credit/financing portfolios.

⁵ OJK telah menyampaikan POJK Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond) dan KDK Nomor 24/KDK.01/2018 tentang Insentif Pengurangan Biaya Pungutan sebesar 25% dari Biaya Pendaftaran dan Pernyataan Pendaftaran Green Bond.
OJK Regulation (POJK) Number 60/POJK.04/2017 on Green Bond and OJK Board of Commissioners Decision on Incentive for Green Bonds Transactions; notifying a discount from their levies to OJK, in an amount of 25%, for first-time issuers who register the Green Bond transactions in the capital market.

⁶ OJK mendukung program percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai yang dicanangkan oleh pemerintah melalui Surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan No-14/D.03/2020 mengenai Dukungan Perbankan dalam Penerapan Program Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.
OJK supports the acceleration of government program of battery electric vehicle through the Letter of the Chief Executive of Banking Supervision No-14/D.03/2020 concerning Banking Support in the Application of the Battery Electric Vehicle Acceleration Program.

⁷ 15 (lima belas) lembaga tersebut terdiri dari 14 (empat belas) bank, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk; PT Bank BRI (Persero) Tbk; PT Bank BNI (Persero) Tbk; PT Bank Central Asia Tbk; PT Bank BRISyariah Tbk; PT Bank Muamalat Indonesia Tbk; PT Bank Artha Graha Internasional Tbk; PT Bank Jabar Banten Tbk; PT Bank Syariah Mandiri Tbk; PT Bank OCBC NISP Tbk; PT Bank CIMB Niaga Tbk; PT Bank HSBC Indonesia; PT Maybank Indonesia Tbk; PT Bank Panin Tbk; dan 1 (satu) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).
Those 15 (fifteen) institutions consist of 14 (fourteen) banks, namely PT Bank Mandiri (Persero) Tbk; PT Bank BRI (Persero) Tbk; PT Bank BNI (Persero) Tbk; PT Bank Central Asia Tbk; PT Bank BRISyariah Tbk; PT Bank Muamalat Indonesia Tbk; PT Bank Artha Graha Internasional Tbk; PT Bank Jabar Banten Tbk; PT Bank Syariah Mandiri Tbk; PT Bank OCBC NISP Tbk; PT Bank CIMB Niaga Tbk; PT Bank HSBC Indonesia; PT Maybank Indonesia Tbk; PT Bank Panin Tbk; and 1 (one) Infrastructure Financing Institution, namely PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

4. Inovasi produk dan layanan keuangan berkelanjutan dalam rangka mempercepat industri keuangan bertransisi ke arah berkelanjutan dilakukan dengan mengembangkan skema inovatif pembiayaan/pendanaan proyek berkelanjutan. Aspek yang perlu dipertimbangkan dalam skema inovatif meliputi keterbukaan informasi, inklusivitas, dukungan ahli, bertujuan jangka panjang, dan kredibel.

5. Kampanye nasional keuangan berkelanjutan yang bertujuan membangun pemahaman terhadap pentingnya kegiatan yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Upaya ini dilakukan melalui pembentukan strategi komunikasi serta berbagai kegiatan edukasi dan sosialisasi.

Implementasi prioritas dalam pengembangan Roadmap tahap II diharapkan dapat mempercepat transisi sektor jasa keuangan menuju bisnis berkelanjutan. Dengan demikian, pertumbuhan Indonesia menjadi negara maju dan ekonomi rendah karbon dapat segera terwujud.

4. The innovation of sustainable financial products and services to accelerate financial industry's transition towards sustainability is carried out by developing innovative schemes of sustainable project financing/funding. Aspects that need to be considered in innovative schemes include information disclosure, inclusiveness, expert support, long-term orientation, and credibility.

5. A national campaign for sustainable finance that aims to build an understanding of the importance of activities that take into account environmental, social, and governance aspects. This effort is carried out through formulating a communication strategy and various educational and socialization programs.

The implementation of priorities in the development of the Phase II Roadmap is expected to accelerate the transition of the financial services sector to a sustainable business. Thus, Indonesia's growth to be a developed country with low carbon economy will be achieved immediately.

⁸ Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement on Climate Change 2015-2030 melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai Perubahan Iklim) dan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Indonesia has ratified Paris Agreement on Climate Change 2015-2030 through Law Number 16 of 2016 concerning Ratification of the Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change and Presidential Decree Number 59 of 2017 concerning Achievement of the Sustainable Development Goals.

⁹ Penelitian dari University of California, Berkeley dirilis pada tahun 2015 dengan judul, "Global non-linear effect of temperature on economic production."
Research from the University of California, Berkeley was released in 2015, "Global non-linear effect of temperature on economic production."

¹⁰ *Multilateral Development Banks* (MDBs) adalah organisasi internasional yang dibentuk oleh berbagai negara dan berfungsi sebagai bank, seperti Bank Dunia, Asian Development Bank, dan Islamic Development Bank.
Multilateral Development Banks (MDBs) are international organizations established by various countries and function as banks, such as World Bank, Asian Development Bank, and Islamic Development Bank.

¹¹ Indonesia merupakan negara dengan kekayaan biodiversitas darat tertinggi kedua di dunia. Jika digabungkan dengan keanekaragaman hayati di laut, maka Indonesia menempati peringkat pertama. Lebih lanjut, status dan tren keanekaragaman hayati Indonesia menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat agro biodiversitas dunia dengan 10% spesies dari total spesies tumbuhan dunia (<http://lipi.go.id/berita/potensi-keanekaragaman-hayati-indonesia-untuk-bioprospeksi-dan-bioekonomi-/22154>)

Indonesia is a country with the second largest terrestrial biodiversity in the world. If combined with marine biodiversity, Indonesia has the largest biodiversity globally. Furthermore, the status and trend of Indonesia's biodiversity make the country one of the world's agro-biodiversity centers with 10% of the world's total plant species (<http://lipi.go.id/berita/potensi-keanekaragaman-hayati-indonesia-untuk-bioprospeksi-dan-bioekonomi-/22154>)

¹² *Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia* (MPSJKI) memuat inisiatif dan strategi yang akan menjadi landasan pengembangan sektor jasa keuangan dalam jangka menengah.
Indonesia Financial Services Sector Master Plan (MPSJKI) contains initiatives and strategies for developing the financial services sector in the medium term.

¹³ Telah terjadi peningkatan kesadaran akan investasi berkelanjutan pada saat pandemi berlangsung. Investor global semakin tertarik untuk menanamkan modalnya pada instrumen keuangan yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (<https://www.weforum.org/agenda/2020/10/covid-19-litmus-test-sustainability>).
There has been growing awareness of sustainable investment amidst the pandemic. Global investors are increasingly interested in investing in financial instruments that integrate environmental, social and governance aspects (<https://www.weforum.org/agenda/2020/10/covid-19-litmus-test-sustainability>).

¹⁴ Skema pembiayaan campuran (*blended finance*) menjadi salah satu contoh inovasi praktik pembiayaan/ investasi dalam mendukung upaya pemenuhan pembiayaan/investasi TPB.
Blended finance scheme is an example of innovative financing/investment practice to support the fulfillment of SDGs financing/investment.

¹⁵ Diadaptasi dan diolah dari UNEP FI dan sumber lainnya, 2020.
Adapted and processed from UNEP FI and other sources, 2020.

¹⁶ Bank Dunia mengeluarkan panduan dalam mengembangkan taksonomi hijau (<http://documents1.worldbank.org/curated/en/953011593410423487/pdf/Developing-a-National-Green-Taxonomy-A-World-Bank-Guide.pdf>).
The World Bank has issued guidance on developing a green taxonomy (<http://documents1.worldbank.org/curated/en/953011593410423487/pdf/Developing-a-National-Green-Taxonomy-A-World-Bank-Guide.pdf>).

DAFTAR PUSTAKA

References

Bank Dunia. (2020). *Developing a National Green Taxonomy: A World Bank Guide*. Grup Bank Dunia. Washington, Amerika Serikat.

<http://documents1.worldbank.org/curated/en/953011593410423487/pdf/Developing-a-National-Green-Taxonomy-A-World-Bank-Guide.pdf>

Burke, M., Hsiang, S. & Miguel, E. (2015). *Global non-linear effect of temperature on economic production*. *Nature* 527, 235–239 (2015). University of Berkeley. <https://doi.org/10.1038/nature15725>

GlobeScan & Global Reporting Initiative. (2020). *Rising Trust in Sustainability Reporting Around the World*. GlobeScan. <https://globescan.com/rising-trust-sustainability-reporting/>

International Finance Corporation. (2019). *Global Progress Report of the Sustainable Banking Network: Innovations in Policy and Industry Actions in Emerging Markets*. International Finance Corporation. Washington, Amerika Serikat.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS. (2020). *Peta Jalan SDGs Indonesia Menuju 2030*. Bappenas. Jakarta. http://sdgs.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2020/08/Roadmap_Bahasa-Indonesia_File-Upload.pdf

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (2020). *Potensi Keanekaragaman Hayati Indonesia untuk Bioprospeksi dan Bioekonomi*. Humas LIPI. Cibinong. <http://lipi.go.id/berita/potensi-keanekaragaman-hayati-indonesia-untuk-bioprospeksi-dan-bioekonomi-/22154>

Otoritas Jasa Keuangan. (2014). *Roadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia (2015 – 2019)*. OJK. Jakarta.

Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik*. OJK. Jakarta.

Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.04/2017 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond)*. OJK. Jakarta.

Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan No-14/D.03/2020 Tentang Dukungan Perbankan dalam Penerapan Program Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai*. OJK. Jakarta.



Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim). Lembaran Negara RI Tahun 2016, No.204. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. (2017). Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Lembaran Negara RI. Sekretariat Negara. Jakarta.

United Nations Environment Programme - Finance Initiative (UNEP-FI). (2019). *Driving Finance Today for the Climate Resilient Society of Tomorrow: For the Global Commission on Adaptation*. UNEP FI. Jenewa. Swiss. <https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2019/07/GCA-Adaptation-Finance.pdf>

United Nations. (2015). *Paris Agreement on Climate Change 2015-2030*. Sekretariat United Nations. Paris, Perancis.

World Economic Forum. (2020). *Why COVID-19 is a litmus test for corporate attitudes to sustainability*. World Economic Forum. Swiss. <https://www.weforum.org/agenda/2020/10/covid-19-litmus-test-sustainability>



Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Pasar Baru, Jakarta Pusat
DKI Jakarta 10710
Tel. (021) 2960 0000
Fex. (021) 385 8321
ojk.co.id